

# RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

Tahun 2022

---

Oktober 2021

---

Dinkominfo Kab. Banyumas



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Renja Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2022 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah :

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya sebagai pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam implementasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### **1.4. SISTEMATIKA**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2021 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2021, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2021.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah**

Analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas**

Kel. Warna: \* Hitam: Tujuan, \* Hijau: Sasaran, \* Merah: Program, \* Oranye: Kegiatan.

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				5	7	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp
3		4	4A	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah										
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3.50		3.1		3.1		100	
	Meningkatkan Tata Kelola E-Government										
		Persentase SDM yang melek IT	%	100		60		23		38.33	
		Persentase aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	%	100		60		30		50	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				1.624.795.000	1.624.795.000		222.099.173		13.67	
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	%	85		85		85		100	
		Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	%	55		55		55		100	
		Persentase peningkatan SDM TIK dan aparatur	%	40		40		20		50	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				18.120.000	18.120.000				0	
		Jumlah Domain yang telah ditetapkan di lingkup Pemkab yang dikelola	domain	358		358		358		100	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.606.675.000	1.606.675.000		222.099.173		13.82	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD	56		56		56		100	
	Meningkatkan Keamanan Informasi										
		Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	100		64		64		100	
		Standarisasi pusat data/data center	aneak	17		17		17		100	
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				166.996.500	166.996.500					0
		Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	aneak	17		17		17		100	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				166.996.500	166.996.500					0
		Jumlah kegiatan pengamanan informasi	kegiatan	1		1		0		0	
	Meningkatkan keterbukaan informasi publik										
		Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		2		4		5		125	
	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik										
		Persentase Data Informasi dan Statistik Yang Terpublikasi dengan baik	%	100		100		50		50	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.389.964.150	10.389.964.150		4.108.141.186			39.54
		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100		100		30		30	
		Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100		100		50		50	
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100		100		50		50	
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100		100		25		25	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Buah	3	3	3	100
		Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan	12	12		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.264.328.107	7.264.328.107	3.276.633.780	45.11
		Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	6	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			492.842.404	492.842.404	21.637.859	4.39
		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	6	50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			88.351.500	88.351.500	40.975.000	46.38
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	6	50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.856.426.140	1.856.426.140	677.113.377	36.47
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	6	50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244.730.000	244.730.000	73.276.170	29.94
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	bulan	12	12	6	50
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			393.468.375	393.468.375	174.837.927	44.44
		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	100	100	100
		Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	%	66	66	50	75.76

PERUBA

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
					1	2	1	2			
		Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	%	100	100	100	75	85	85	85	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										44.44
		Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	OPD	56	56	56	56	56	56	100	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>										5.47
		Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	100	100	75	85	85	85	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										5.47
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	buku	235	235	235	0	0	0	0	

Analisis kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang tercapai adalah Indeks SPBE, sedangkan untuk Nilai KIP belum sesuai harapan, sedangkan untuk kinerja program yang tercapai adalah Program Informasi Dan Komunikasi Publik dan program /kegiatan yang belum tercapai lainnya dikarenakan masih akan dilaksanakan di semester II Tahun 2021;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah terdapat anggaran program/kegiatan yang terkena refocusing dan akan dilaksanakan di semester II Tahun 2021;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain : penyesuaian target (*retargeting*), melaksanakan efisiensi dan penundaan kegiatan di Tahun 2021;
4. Serapan Anggaran dan penjelasannya antara lain: serapan anggaran kurang maksimal dikarenakan kebanyakan dilakukan di Semester II Tahun 2021.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 12.637.724.025,00 dengan 5 program dan 11 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp 4.507.403.286,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 36.07% dan capaian kinerja keuangan sebesar 35.65%.

Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran 0%;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran 44.44%.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, Silpa anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 8.130.320.739,00.

## **2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

- a. Masih belum optimalnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- c. Masih rendahnya tingkat Keamanan Informasi;
- d. Masih belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Masih belum optimalnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- f. Masih belum optimalnya Tata Kelola Opini Publik.
- g. Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mempunyai tugas peran strategis di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok**

Dinkominfo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang merupakan

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinkominfo mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informasi, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informasi, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informasi, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informasi, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah informasi dan pemikiran strategis terkait bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, persandian, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi:

1. Pengembangan Aplikasi Informatika;
2. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Penyelenggaraan Keamanan Informasi;
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pengembangan Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Keamanan Informasi, Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD;

2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan melaksanakan manajemen risiko.

3. Review Terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Ket:

Matrik pertama adalah matrik hasil berita acara pemetaan sebelum dan setelah pemutakhiran

Matrik kedua adalah matrik rankhir renstra perubahan

Matrik Hasil Reviu Renja 2021

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-
2	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	83.970.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	83.970.000
3	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	83.970.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	83.970.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-
5	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000
6	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media Dan Kemitraan Komunitas	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media Dan Kemitraan Komunitas	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	215.000.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	215.000.000
8	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	41.010.000	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	41.010.000
9	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	38.237.875	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	38.237.875
10	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.020.500	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.020.500

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
11	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.996.500	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.996.500
12	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.996.500	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.996.500
13	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media Dan Kemitraan Komunitas	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media Dan Kemitraan Komunitas	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
14	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.020.500	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.020.500
15	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.200.000.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.200.000.000
16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.996.500	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.996.500

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
17	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	85.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	85.000.000
18	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	-
19	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.200.000.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.200.000.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
20	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	7.200.000	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	7.200.000
21	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	82.705.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	82.705.000
22	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
23	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	25.000.000	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	25.000.000
24	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-
25	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	41.010.000	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	41.010.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
26	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	-
27	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	42.500.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	42.500.000
28	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
29	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
30	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
31	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
32	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	42.500.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	42.500.000
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
34	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	-	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	-
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	-
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.278.107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.278.107
							<b>TOTAL</b>	<b>12.617.724.025</b>

Matrik Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
<b>TOTAL</b>						13.836.791.000
<b>Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>			<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>		3.2	13.295.839.000
	<b>Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah</b>	%	90	13.128.244.000
		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				1.904.817.000
			<b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi</b>	%	35	25.825.000

		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				25.825.000
			<b>Jumlah Nama Domain yang dikelola</b>	<b>domain</b>	358	25.825.000
		<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				25.825.000
			<b>Jumlah domain utama yang dikelola</b>	<b>Unit</b>	1	60.000
			<b>Jumlah sub domain OPD yang dikelola</b>	<b>Unit</b>	56	3.360.000
			<b>Jumlah domain desa yang dikelola</b>	<b>Unit</b>	301	22.405.000
			<b>Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda</b>	<b>%</b>	50	1.878.992.000

		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				1.878.992.000
			<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Layanan Publik secara online dan terintegrasi</b>	<b>SKPD</b>	56	1.878.992.000
		<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				125.000.000
			<b>Jumlah aturan di Bidang TIK yang disusun</b>	<b>aturan</b>	0	-
			<b>Jumlah rencana Induk SPBE yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	1	125.000.000
			<b>Jumlah Raperbup Rencana Induk SPBE yang disusun</b>	<b>aturan</b>	0	-
			<b>Jumlah Raperbup pengoperasian sistem informasi dan audit sistem informasi yang disusun</b>	<b>aturan</b>	0	-
		<b>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</b>				163.411.000

			<b>Jumlah elemen data center,NOC dan DRC yang terstandarisasi</b>	<b>Buah</b>	14	50.410.000
			<b>Jumlah Pusat Data yang dikelola</b>	<b>Unit</b>	1	113.001.000
		<b>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</b>				1.234.308.000
			<b>Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik</b>	<b>SKPD</b>	30	30.000.000
			<b>Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi dengan baik</b>	<b>Titik</b>	207	1.204.308.000
		<b>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>				240.861.000
			<b>Jumlah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara</b>	<b>aplikasi</b>	6	240.861.000
		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</b>				90.323.000

			<b>Jumlah dokumen masterplan kota cerdas yang dikelola</b>	<b>Dokumen</b>	1	40.000.000
			<b>Jumlah pengembangan ekosistem kota cerdas yang difasilitasi</b>	<b>Unit</b>	1	50.323.000
		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</b>				25.089.000
			<b>Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK</b>	<b>Orang</b>	175	19.000.000
			<b>Jumlah Pelatihan SDM TIK yang dilaksanakan</b>	<b>Keg</b>	6	6.089.000
		<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				11.223.427.000
			<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	100	10.000.000

		<b>X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				10.000.000
			<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	9	10.000.000
		<b>X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>				2.500.000
			<b>Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	4	2.500.000
		<b>X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				7.500.000
			<b>Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	4	2.500.000
			<b>Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan</b>	<b>Keg</b>	12	5.000.000
			<b>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	100	7.947.202.000

		<b>X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				7.947.202.000
			<b>Jumlah administrasi keuangan yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	12	7.947.202.000
		<b>X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>				7.815.682.000
			<b>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</b>	<b>Orang</b>	61	7.815.682.000
		<b>X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>				131.520.000
			<b>Jumlah pengelola keuangan SKPD</b>	<b>Orang</b>	19	131.520.000
			<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	100	2.931.782.000
		<b>X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				550.000.000
			<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	1	550.000.000
		<b>X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>				550.000.000

			<b>Jumlah informasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan (DBHCHT)</b>	<b>informasi</b>	128	550.000.000
		<b>X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				518.688.000
			<b>Jumlah administrasi umum yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	3	518.688.000
		<b>X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>				20.071.000
			<b>Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia</b>	<b>Jenis</b>	18	20.071.000
		<b>X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>				86.343.000
			<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	40	86.343.000
		<b>X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>				28.879.000

			<b>Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	40	28.879.000
		<b>X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>				212.911.000
			<b>Jumlah logistik kantor yang tersedia</b>	<b>Bulan</b>	3	212.911.000
		<b>X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>				53.470.000
			<b>Jumlah cetakan yang tersedia</b>	<b>Buah</b>	2	53.470.000
		<b>X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>				117.014.000
			<b>Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan</b>	<b>Kali</b>	224	117.014.000
		<b>X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				1.863.094.000
			<b>Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	12	1.863.094.000

		<b>X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>				293.851.000
			<b>Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola</b>	<b>Bulan</b>	12	293.851.000
		<b>X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>				1.569.243.000
			<b>Jumlah Pegawai Non ASN</b>	<b>Orang</b>	50	1.553.269.040
			<b>Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia</b>	<b>jasa</b>	12	15.973.960
			<b>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai</b>	<b>%</b>	100	334.443.000
		<b>X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				98.536.000
			<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	3	98.536.000
		<b>X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel</b>				25.519.000
			<b>Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	10	25.519.000

		<b>X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>				30.000.000
			<b>Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	12	30.000.000
		<b>X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>				43.017.000
			<b>Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	10	43.017.000
		<b>X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				235.907.000
			<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Bulan</b>	12	235.907.000
		<b>X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>				117.821.000

			<b>Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	31	117.821.000
		<b>X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel</b>				5.017.000
			<b>Jumlah mebelair yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	83	5.017.000
		<b>X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>				50.179.000
			<b>Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	3	50.179.000
		<b>X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>				50.179.000
			<b>Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	3	50.179.000
		<b>X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>				12.711.000
			<b>Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	43	12.711.000

	<b>Meningkatkan Keamanan Informasi</b>		<b>Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi</b>	%	86	167.595.000
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				167.595.000
			<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>		3	167.595.000
		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				167.595.000
			<b>Jumlah kegiatan pengamanan informasi</b>	<b>Keg</b>	162	167.595.000
		<b>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>				85.305.000
			<b>Jumlah pengamanan informasi yang difasilitasi</b>	<b>Keg</b>	1	85.305.000

		<b>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				82.290.000
			<b>Jumlah tanda tangan elektronik (TTE) yang tersedia</b>	<b>Buah</b>	5	17.496.500
			<b>Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik</b>	<b>Unit</b>	4	64.793.500
<b>Meningkatkan keterbukaan informasi publik</b>			<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)</b>		96	540.952.000
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral</b>		<b>Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik</b>	%	100	70.179.000
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				70.179.000
			<b>Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah</b>	%	100	70.179.000
		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				70.179.000

			<b>Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersusun</b>	<b>data</b>	250	70.179.000
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>				50.179.000
			<b>Jumlah forum data yang mendukung penguatan statistik sektoral yang disusun</b>	<b>Forum</b>	1	20.625.000
			<b>Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dihasilkan</b>	<b>Buku</b>	150	29.554.000
		<b>Membangun Metadata Statistik Sektoral</b>				20.000.000
			<b>Jumlah metadata statistik sektoral</b>	<b>Buah</b>	10	20.000.000
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik</b>		<b>Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola</b>	<b>%</b>	100	470.773.000
		<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				470.773.000
			<b>Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik</b>	<b>%</b>	100	470.773.000

		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				470.773.000
			<b>Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik</b>	<b>SKPD</b>	56	470.773.000
		<b>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>				20.000.000
			<b>Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>aduan</b>	7000	20.000.000
		<b>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>				196.885.000
			<b>Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	2	118.434.500
			<b>Jumlah Konten yang dikemas</b>	<b>Buah</b>	19	78.450.500
		<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>				45.000.000

			<b>Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website</b>	<b>SKPD</b>	56	30.000.000
			<b>Jumlah media komunikasi publik yang dikelola</b>	<b>Buah</b>	4	15.000.000
		<b>Pelayanan Informasi Publik</b>				50.000.000
			<b>Jenis Informasi layanan publik yang dipublikasikan</b>	<b>Jenis</b>	3	50.000.000
		<b>Layanan Hubungan Media</b>				25.000.000
			<b>Jumlah layanan hubungan media yang dilaksanakan</b>	<b>Layanan</b>	4	25.000.000
		<b>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</b>				45.161.000
			<b>Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang difasilitasi</b>	<b>Keg</b>	3	45.161.000
		<b>Manajemen Komunikasi Krisis</b>				13.548.000
			<b>Jumlah komunikasi krisis yang selesai ditangani</b>	<b>Buah</b>	1	13.548.000
		<b>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</b>				50.179.000
			<b>Jumlah PPID Pembantu di SKPD yang Aktif</b>	<b>Orang</b>	56	14.000.000

			<b>Jumlah PPID Pembantu di Desa yang Aktif</b>	<b>Orang</b>	130	36.179.000
		<b>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</b>				25.000.000
			<b>Jumlah KIM yang di bina</b>	<b>Kelompok</b>	24	25.000.000

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
<b>2</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							<b>13,599,017,000</b>				<b>13,278,400,000</b>					
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>11,223,427,000</b>			<b>11,281,618,000</b>					
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>10,000,000</b>			<b>0</b>				
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, KrANJI	100 %	4 Dokumen	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, KrANJI	100 %	4 Dokumen 12 Keg	100 %	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>7,947,202,000</b>			<b>8,013,621,000</b>				
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, KrANJI	100 %	61 Orang	100 %	7,815,682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7,881,002,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	19 Orang	100 %	131,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	132,619,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>550,000,000</b>			<b>530,000,000</b>				
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan		Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, KrANJI		128 Informasi		550,000,000	DBH CHT				530,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>522,836,920</b>			<b>523,024,000</b>				
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, KrANJI	100 %	18 Jenis	100 %	20,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,239,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, KrANJI	100 %	40 Jenis	100 %	86,343,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	87,065,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	40 Jenis	100 %	33,027,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	29,120,000
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	3 Bulan	100 %	212,911,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	214,691,000
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	2 Buah	100 %	53,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	53,917,000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	224 Kali	100 %	117,014,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	117,992,000
<b>2 16 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>98,536,000</b>					<b>98,536,000</b>
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100 %	10 Unit	100 %	25,519,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	25,519,000
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	12 Jenis	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	30,000,000
2 16 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	10 Unit	100 %	43,017,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	43,017,000
<b>2 16 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1,863,556,080</b>					<b>1,878,665,000</b>
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	12 Bulan	100 %	262,422,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	296,307,000
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	12 Jasa 50 Orang	100 %	1,601,134,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,582,358,000
<b>2 16 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>231,296,000</b>					<b>237,772,000</b>
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	31 Unit	100 %	117,821,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	118,806,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	jumlah mebelair yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	83 Unit	100 %	5,017,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	5,059,000
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	3 Unit	100 %	50,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	50,598,000
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	3 Unit	100 %	50,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	50,598,000
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	43 Jenis	100 %	8,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	12,711,000
<b>2 16 02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>								<b>470,773,000</b>					<b>321,126,000</b>
<b>2 16 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>470,773,000</b>					<b>321,126,000</b>
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	7000 aduan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	7,286,000
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah Konten yang dikemas Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	19 Buah 2 Unit	100 %	196,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	201,288,000
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	4 Buah 56 SKPD	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	0
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jenis Informasi layanan publik yang dipublikasikan	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	3 Jenis	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	2,754,000
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah layanan hubungan media yang dilaksanakan	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	4 Layanan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	0
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang difasilitasi	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	3 Keg	100 %	45,161,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	45,539,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 02 2.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah komunikasi krisis yang selesai ditangani	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	1 Buah	100 %	13,548,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	13,661,000
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah PPIID Pembantu di Desa yang Aktif Jumlah PPIID Pembantu di SKPD yang Aktif	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	130 Orang 56 Orang	100 %	50,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	50,598,000
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Jumlah KIM yang di bina	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	24 Kelompok	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	100 %	0
<b>2 16 03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>								<b>1,904,817,000</b>					<b>1,675,656,000</b>
<b>2 16 03 2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>25,825,000</b>					<b>18,337,000</b>
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Jumlah domain desa yang dikelola Jumlah domain utama yang dikelola Jumlah sub domain OPD yang dikelola	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	35 %	301 Unit 1 Unit 56 Unit	35 %	25,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	35 %	18,337,000
<b>2 16 03 2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>1,878,992,000</b>					<b>1,657,319,000</b>
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Jumlah aturan di Bidang TIK yang disusun Jumlah Raperbup pengoperasian sistem informasi dan audit sistem informasi yang disusun Jumlah Raperbup Rencana Induk SPBE yang disusun Jumlah rencana induk SPBE yang disusun	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	50 %	0 aturan 0 aturan 0 aturan 1 Dokumen	50 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	50 %	0
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Jumlah elemen data center,NOC dan DRC yang terstandarisasi Jumlah Pusat Data yang dikelola	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara	50 %	14 Buah 1 Unit	50 %	163,505,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	50 %	83,695,000
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi dengan baik Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Kab. Banyumas, Rawalo, Tambaknegara Kab. Banyumas, Banyumas, Sudagaran Kab. Banyumas,	50 %	207 Titik 30 SKPD	50 %	1,234,213,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	50 %	1,214,373,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Karanglewas Kidul Kab. Banyumas, Sokaraja, Karangnanas Kab. Banyumas, Batumraden, Karangmangu Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Karangklesem Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Sokanegara Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Bancarkembar									
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Jumlah aplikasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	50 %	6 aplikasi	50 %	240,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	50 %	242,874,000
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Jumlah dokumen masterplan kota cerdas yang dikelola Jumlah pengembangan ekosistem kota cerdas yang difasilitasi	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	50 %	1 Dokumen 1 Unit	50 %	90,323,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	50 %	91,078,000
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Jumlah Pelatihan SDM TIK yang dilaksanakan Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	50 %	6 Keg 175 Orang	50 %	25,089,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	50 %	25,299,000
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								<b>70,179,000</b>					<b>50,598,000</b>
<b>2 20 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>								<b>70,179,000</b>					<b>50,598,000</b>
<b>2 20 02 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>70,179,000</b>					<b>50,598,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dihasilkan Jumlah forum data yang mendukung penguatan statistik sektoral yang disusun	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	150 Buku 1 Forum	100 %	50,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	100 %	50,598,000
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	Jumlah metadata statistik sektoral	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	100 %	10 Buah	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	100 %	0
<b>2 21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								<b>167,595,000</b>					<b>168,996,000</b>
<b>2 21 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>								<b>167,595,000</b>					<b>168,996,000</b>
<b>2 21 02 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>167,595,000</b>					<b>168,996,000</b>
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah pengamanan informasi yang difasilitasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	3 skor	1 Keg	3 Skor	85,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	3 skor	86,018,000
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik Jumlah tanda tangan elektronik (TTE) yang tersedia	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Kranji	3 skor	4 Unit 5 Buah	3 Skor	82,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	3 skor	82,978,000
<b>TOTAL</b>									<b>13,836,791,000</b>					<b>13,497,994,000</b>

## **BAB IV**

# **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinkominfo Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Dinkominfo Kabupaten Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. YAYAH SETIYONO, MM  
NIP. 19640514 198503 1 010